



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS SOSIAL

Jln. TMP. LAPAK TANA No. 6 Telp/Fax. (0383) 21033

LARANTUKA



**DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk-nya, maka salah satu kewajiban yang dipersyaratkan bagi setiap Intansi Pemerintah berupa perencanaan Strategis (RENSTRA) dapat kami selesaikan sesuai rencana.


RENSTRA-PD ini berisi permasalahan yang dihadapi, sasara, arah kebijakan yang akan ditempuh serta rencana prorioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan hierarkinya, rencana strategis ini mengacau pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026.

Perencanaan strategis ini selanjutnya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan dijadikan pedoman dan acuan didalam melaksanakan Program Pembangunan Kesejatraan Sosial di Kabupaten Flores Timur dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Disamping itu pula Renstra ini akan menjadi tolak ukur didalam menilai dan mengukur Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sesuai praturan mentri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perubahan encana pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan renstra ini, Semoga Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi bangunan kesejatraan sosial masyarakat Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Maret 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,


ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP.19670420 199703 1 001

DAFTAR ISI		Halaman
HALAMAN JUDUL i		
KATA PENGANTAR..... ii		
DAFTAR ISI..... iii		
DAFTAR TABEL iv		
DAFTAR GAMBAR..... v		
BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum.....	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR		
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Kabuapten Flores Timur	6
2.2	Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.....	10
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur	13
2.4	Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR		
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	18
3.2	Telahaan Visi dan Misi Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025.....	18
3.3	Telahaan Renstra K/L.....	18
3.4	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah	19
3.5	Penentuan isu-isu strategis.....	20
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur	21
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
5.1	Strategi da Kebijakan	22
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 23		
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 49		
BAB VIII PENUTUP 51		

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur berdasarkan Pendidikan dan Eselonering 10

Tabel 2.2 Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tingkat berdasarkan dan golongan 11

Tabel 2.3 Inventaris Barang A..... 11

Tabel 2.4 Inventaris Barang B 11

Tabel 2.5 Inventaris Barang C 12

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur 14

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur 15

Tabel 2.8 Analisa Gambaran Pelayanan Dinas Sosial 17

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 18

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong 19

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 21

Tabel 5.1 Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan 22

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur 24

Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 49

Tabel 7.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial 49

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra PD..... 2

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan
lainnya 2

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Tahun 2022 9



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 15 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026. /

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya /
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

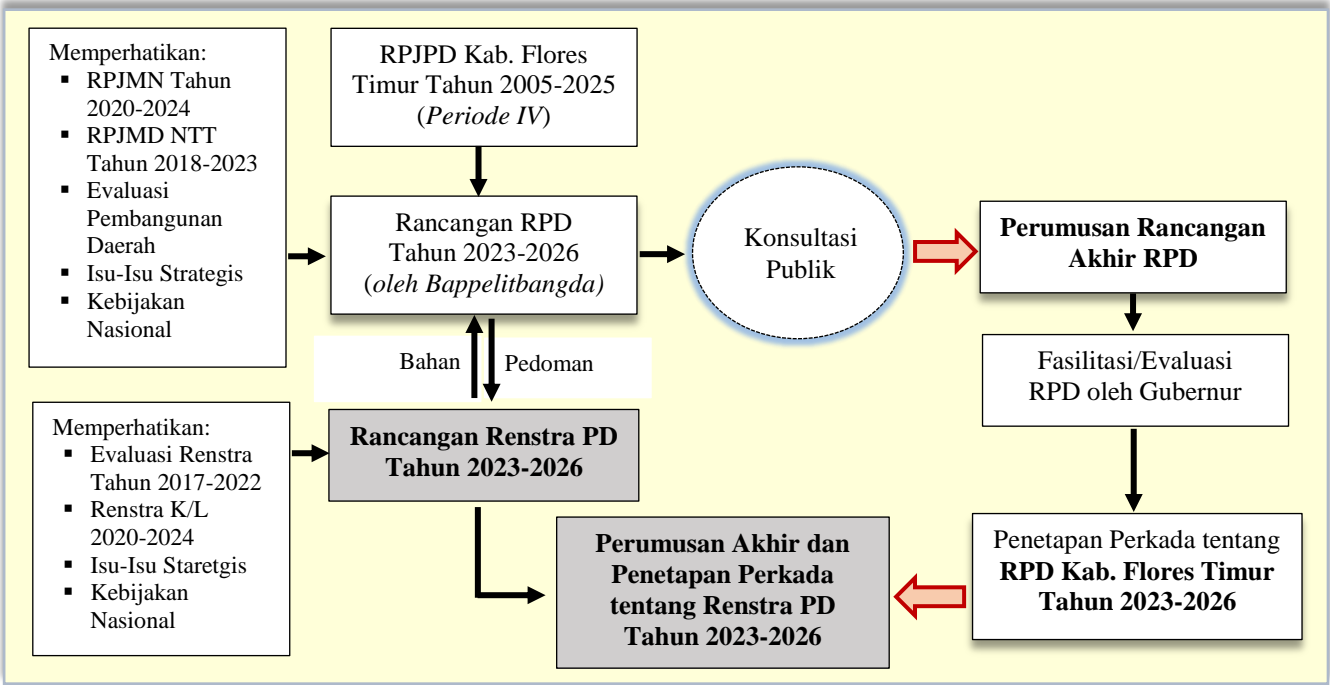
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selama kurun waktu empat (4) tahun yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Sosial Kabupaten Flores Timurdan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan, (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang peduli terhadap urusan bidang sosial di daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Rangkaian proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

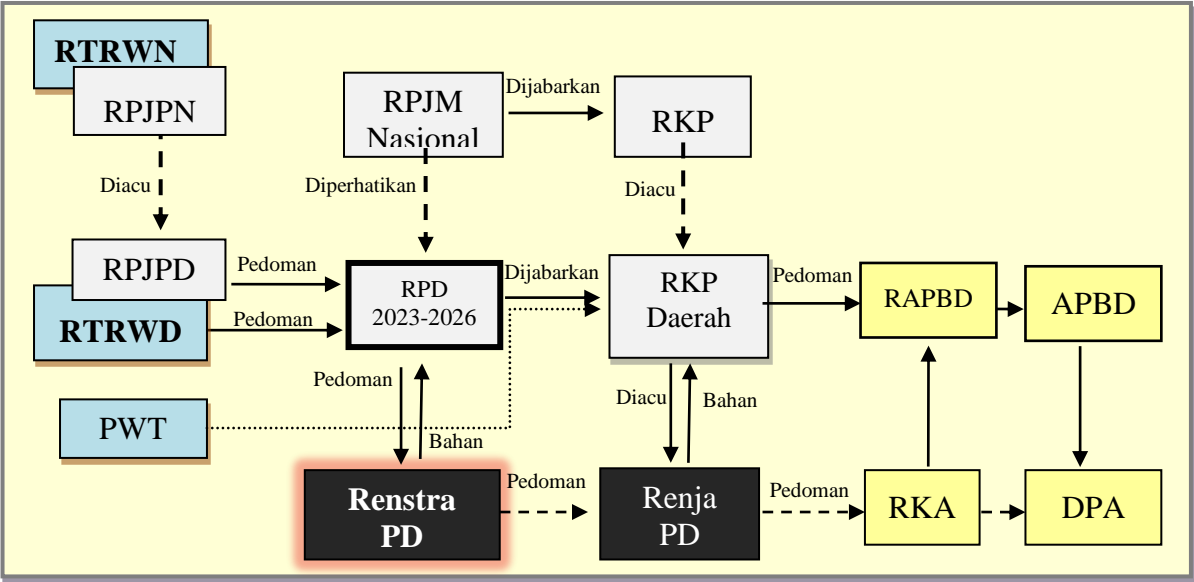
Gambar 1.1 Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah Beserta Pemutakhirannya Kepmen 050-5889 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Provinsi dan Di Daerah Kabupaten /Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
 16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu empat tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 sebagai tolok ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Sosial yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan periode 2023-2026 yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan Dinas Sosial.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- Bab1 : Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;
- Bab 2 : Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, sumberdaya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, kondisi dan kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, serta peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan
- Bab3 : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;

- Bab 4 : Tujuan dan Sasaran, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran rencana perangkat daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.
- Bab 5 : Strategi dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.
- Bab 6 : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab 7 : Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
- Bab 8 : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan kemudian dijabarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Kedudukan Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan tugas dan fungsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a, kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial;
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- d. Pembinaan, pengoordinasian, dan pengendalian Urusan Sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan, serta penyusunan program dan pelaporan lingkup Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan
- b. Penyusunan program dan anggaran
- c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian lingkup dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penatausahaan administrasi perkantoran
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian
- c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam susunan organisasi, ada 4 bidang di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, antara lain :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial. Bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja rehabilitasi sosial
 - b) Perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial
 - c) Pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial
 - d) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan perlindungan dan jaminan sosial. Bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja perlindungan dan jaminan sosial
 - b) Perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial
 - c) Pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial
 - d) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlindungan dan jaminan sosial
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan sosial. Bidang pemberdayaan sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial
 - b) Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial
 - c) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial
 - d) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan sosial
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan penanganan fakir miskin. Bidang penanganan fakir miskin dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja penanganan fakir miskin
 - b) Perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin
 - c) Pelaksanaan program dan kegiatan penanganan fakir miskin
 - d) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penanganan fakir miskin
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk kelompok jabatan struktural sebagai berikut :

1. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator
4. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas

Selain jabatan struktural, pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur terdapat jabatan fungsional yang jenis dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun jabatan fungsional hasil penyeteraan jabatan, terdiri dari

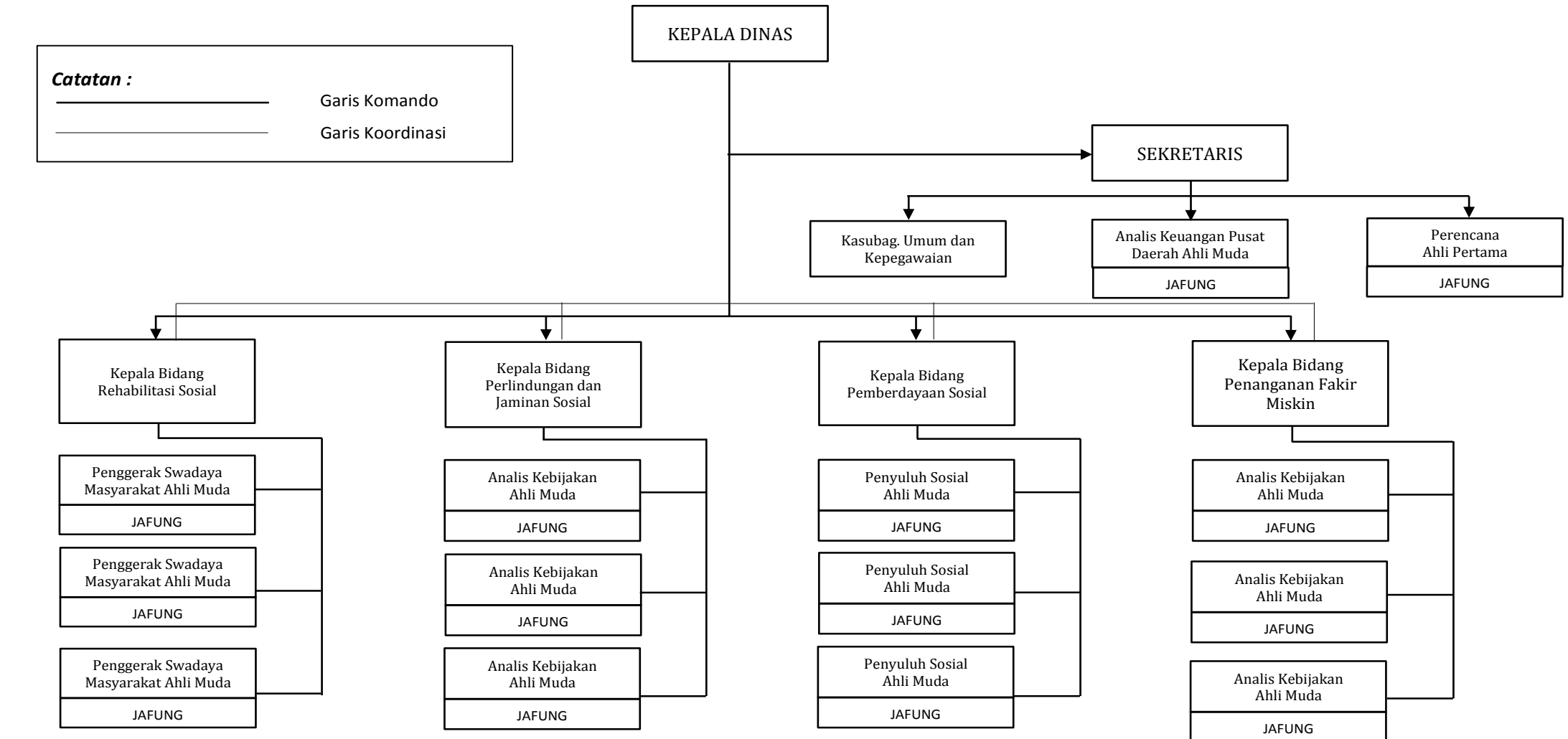
- a) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
- b) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
- c) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
- d) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah
- e) Jabatan Fungsional Perencana

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2022**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 61 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur memiliki sumber daya manusia sebagai berikut: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, di akhir tahun 2021 berjumlah 26 orang, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 15 perempuan. Sedangkan untuk tenaga administrasi perkantoran (tenaga honorer daerah), berjumlah 23 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 11 perempuan dengan rata – rata pendidikan terakhir dari Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), saat ini berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 11 laki – laki dan 8 perempuan yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan Permensos No 24 Tahun 2013, TKSK adalah seseorang yang diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. TKSK mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa dan atau kelurahan. TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan dimana per satu kecamatan satu TKSK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional, per 31 Desember 2021 dilakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dari 14 pegawai dalam jabatan administrasi (Eselon 4) yang mendapat penyetaraan ke dalam jabatan fungsional, dan sisa 12 pegawai yang masih dalam jabatan struktural yang ada.

Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar lebih rinci pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut:

Tabel. 2.1
*Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering
Tahun 2021*

No.	Eselonering	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SD/SLTA/SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	3	2	5
3	Eselon IV	-	1	-	-	1
4	Fungsional	3	3	8	-	14
5	Non Eselon	2	-	3	-	5
Jumlah		5	4	14	3	26

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2021

Tabel. 2.2
Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
Tahun 2021

No.	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	-	-	1	2	3
2	S1	-	-	10	4	14
3	D3/D2/D1	-	-	4	-	4
4	SMA	-	2	3	-	5
Jumlah		-	2	18	6	26

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Dinas SosialKabupaten Flores Timur kurang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.3
Kondisi Asset/ Inventaris Barang A
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

a. Inventaris Barang A

TANAH

No. Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan
					Sertifikat		
					Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1959	1994	Kel. PTW. Bao Kec. Lantunka	AE. 382 869	18-06-1994	Kantor Dinas Sosial
2.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	400	1997	Kel. PTW. Bao Kec. Lantunka	AJ. 475.519	03-10-1997	Kantor Dinas Sosial
3.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	200	2005	Kel. PTW. Bao Kec. Lantunka	AQ. 623 660	08-03-2005	Kantor Dinas Sosial
4.	Tanah Untuk Makam Pahlawan	1638	2008	Kel. PTW. Bao Kec. Lantunka	BC. 750 607	31-03-2008	Taman Makam Lapak Tana

Tabel 2.4
Kondisi Asset/ Inventaris Barang B
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

b. Inventaris Barang B
PERALATAN DAN MESIN

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / 125 CW	2017	Baik	2
2.	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / CB 15A 1 RRF M/T	2013	Baik	1
3.	1.3.2.02.001.001.006	Mobil Sedan	Toyota Rush./ 1.5 s	2013	Baik	1
4.	1.3.2.02.001.001.006	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Mobil TRUCK Kayu RESQUE	2016	Baik	1

5.	1.3.2.02.001.001.006	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Mobil RANGER RESQUE	2016	Baik	1
6.	1.3.2.02.001.001.006	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Mobil DUM LAP	2016	Baik	1
7.	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	Acer Aspire	2015	Rusak Berat	3
8.	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	Toshiba / Salite Intel Core i7	2017	Baik	17
9.	1.3.2.10.002.003.003	Printer(Peralatan Personal Komputer)	Cannon / iP 2770	2017	Rusak Berat	3
10.	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / iP 2770	2017	Baik	9
11.	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink Pro 700SFC	2017	Rusak Berat	3
12.	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink Pro 700SFC	2017	Baik	3
13.	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Panasonic	2015	Baik	2
14.	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Dispenser	2007	Baik	3
15.	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Kipas Angin	2007	Baik	2
16.	1.3.2.05.003.007.007	Lemari	Arsip Buku	2008	Kurang Baik	1
17.	1.3.2.05.003.007.007	Lemari	Arsip Buku	2008	Baik	3
18.	1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja	Kayu Kelas II	2017	Baik	15
19.	1.3.2.05.003.006.005	Kursi Kayu	Kursi Kerja	2007	Baik	26
20.	1.3.2.05.003.006.005	Kursi Plastik	Kursi Fiber Glas/Plastik	2019	Baik	100
21.	1.3.2.05.002.001.048	Kursi Sofa	Sofa Sudut	2006	Baik	2
JUMLAH						199

Tabel 2.5
Kondisi Asset/ Inventaris Barang C
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

c. Inventaris Barang C
GEDUNG DAN BANGUNAN

No. Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Ket.
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Kantor Dinas Sosial
2.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	Kantor Dinas Sosial
3.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	Kantor Dinas Sosial
4.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	Kantor Dinas Sosial

5.	Asrama Permanen	Baik	Kantor Dinas Sosial
6.	Rumah Negara Gol II Lain-lain	Baik	Kantor Dinas Sosial
7.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Kantor Dinas Sosial

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, 2021

Berdasarkan kondisi *Asset* (peralatan dan mesin) yang menjadi sarana prasarana dalam menunjang kegiatan pelayanan perkantoran dan pelayanan bagi, sampai dengan 31 Desember 2021, dari total sarana prasarana 199 unit, ada 10 unit dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi, yaitu laptop tipe Acer Aspire 3 unit, printer tipe Cannon / iP 27703 unit, Uninterruptible Power Supply (UPS) tipe Prolink Pro 700SFC 3 unit, dan lemari kayu untuk arsip 1 unit. Kekurangan sarana prasarana yang ada dapat menyebabkan proses pelayanan kepada masyarakat khususnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak berjalan dengan baik dan optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Beberapa indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tahun 2017 s/d 2021, meliputi Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya			100%	100%	100%	100%	100%	43%	43%	50%	46%	(0.57)	(0.57)	(0.50)	(0.54)
2.	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			100%	100%	100%	100%	100%	72%	140%	80%	86%	(0.28)	0.40	(0.20)	(0.14)
3.	Persentase anak terlantar yang ditangani			2%	2%	2%	2%	2%	8%	8%	7%	7%	0.06	0.06	0.05	0.05
4.	Persentase penanganan Penyandang Disabilitas			100%	7%	7%	7%	7%	14%	40%	20%	24%	(0.86)	0.33	0.13	0.17
5.	Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina			322 Org	322 Org	322 Org	322 Org	322 Org	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani			12%	12%	12%	12%	12%	0	0	0	0,5%	(0.12)	(0.12)	(0.12)	(0.11)
7.	Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan			87.7%	90.5%	96.4%	96.4%	97.4%	68%	72%	117%	108%	(0.20)	(0.18)	0.20	0.11

Dari indikator pelayanan Dinas Sosial yang tergambar pada tabel diatas terlihat bahwa selama 4 tahun periode Renstra 2017-2022 pencapaian kinerja belum sepenuhnya memuaskan sesuai dengan target. Hal ini tergambar pada beberapa indikator utama yang mencerminkan kondisi Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan PMKS lainnya yang diberdayakan, Pelayanana dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar dan Penyandang Disabilitas yang ditangani, Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina, eks penyandang penyakit sosial yang ditangani, dan Kelembagaan Sosial yang diberdayakan.

Pada indikator Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT),dan PMKS lainnya yang diberdayakan, terlihat capaian masih dibawah target yang menggambarkan bahwa masih banyak Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya yang belum sama sekali diberdayakan. Pada indikator Anak Terlantar yang ditangani, rata-rata capaian setiap tahunnya sudah lebih dari target yang menggambarkan anak terlantar yang ditangani sudah cukup meningkat jumlahnya dari target yang ditetapkan walaupun jumlah peningkatannya belum signifikan. Pada indikator Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina, tidak ada capaian yang dihasilkan, ini disebabkan karena tidak ada program kegiatan yang dilaksanakan selama periode renstra 2017-2022. Pada indikator eks penyandang penyakit sosial yang ditangani, tidak ada capaian yang dihasilkan selama tahun 2018 sampai tahun 2020, ini disebabkan karena tidak ada program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tersebut. Di tahun 2021, ada 1 ODHA (orang dengan HIV/AIDS) dari Kelurahan Pukentobi Wangibao Kecamatan Larantuka yang diberikan bantuan dalam bentuk sembako yang bersumber dari dana APBN.

Pada indikator Kelembagaan Sosial yang diberdayakan rata-rata capaian setiap tahunnya sudah lebih dari target yang menggambarkan banyak lembaga sosial khususnya karang taruna dan kelompok pemuda yang diberdayakan.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARANTAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Belanja Tidak Langsung	1,518,902,505	1,728,600,344	1,674,727,528	2,913,640,764	1,918,090,502	1,494,014,474	1,685,864,766	1,620,261,050	2,764,892,119	0.98	0.98	0.97	0.95	12.62	26.53
Belanja Langsung	5,623,088,497	5,471,170,007	4,679,201,102	1,240,130,196	3,637,470,498	5,066,354,600	5,425,147,795	4,644,989,985	1,230,773,550	0.90	0.99	0.99	0.99	25.66	(35.77)
Total Belanja	7,141,991,002	7,199,770,351	6,353,928,630	4,153,770,960	5,555,561,000	6,560,369,074	7,111,012,561	6,265,251,035	3,995,665,669	0.92	0.99	0.99	0.96	9,78	(10.00)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Hasil analisis terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi NTT, menunjukkan bahwa prioritas pelayanan diarahkan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan. Prioritas di atas sejalan dengan kondisi sosial di kabupaten Flores Timur dan masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah dan pelaku pembangunan. Dalam upaya mengatasi kondisi permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Flores Timur tersebut beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu :

1. Belum validnya database PMKS dan DTKS di setiap desa dan kelurahan sehingga belum optimalnya program pemberdayaan bagi PMKS.
2. Belum optimalnya peran PSKS dalam memberikan pelayanan kepada PMKS.
3. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam pelayanan terpadu.
4. Belum maksimal penggunaan aplikasi SIKS-NG oleh masing-masing desa dan kelurahan.

Sedangkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya dukungan dan kerjasama Lintas Sektor dan NGO/LSM yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan secara bersama.
2. Adanya dukungan peraturan/kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.
3. Penyediaan tenaga PEKSOS (Pekerja Sosial) melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang mana sakti peksos merupakan tenaga yang dikontrak oleh Kementerian Sosial RI dan akan ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, untuk melakukan tugas pendampingan PKSA, pendampingan lembaga, respon kasus anak, dan tugas khusus lainnya.
4. Adanya verifikasi data penduduk miskin yang ada di dalam DTKS *by name by address* melalui aplikasi SIKS-NG yang dikelola oleh PUSDATIN Kemensos.

Analisa Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi pelayanan Dinas Sosial.

Tabel 2.8
Analisa Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
	Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)
Belum validnya data kemiskinan	Belum dilakukan pemutakhiran data PMKS dan belum optimalnya verivali data penduduk miskin dalam DTKS	<ul style="list-style-type: none">• Masih kurangnya pemahaman dari pemerintah desa dan kelurahan akan pentingnya pemutakhiran data penduduk miskin sampai pada level terkecil• Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemutakhiran data kependudukan
Rendahnya pelayanan sosial bagi PMKS	<ul style="list-style-type: none">• Masih kurangnya tenaga pekerja sosial yang berkompeten• Belum adanya sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosialdan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka.	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya peran masyarakat dan LSM/NGO dalam mendukung pelayanan sosial bagi PMKS• Belum maksimalnya dukungan pemerintah terkait pembentukan sistem layanan terpadu.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang sosial dan tentu tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bidang urusan sosial, diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat	Rendahnya pelayanan sosial bagi PMKS	<ul style="list-style-type: none">• Upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial yang belum optimal• Belum optimalnya validasi data kemiskinan
		Tingginya beban pengeluaran masyarakat dan masih rendahnya pemberdayaan masyarakat	Kurangnya bantuan modal usaha
2.	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	Rendahnya pendapatan keluarga miskin	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya validasi data kemiskinan• Kurangnya bantuan modal usaha
		Belum terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk miskin	Belum optimalnya sarana dan prasarana layak
3.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana	Rendahnya upaya mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas pembangunan dan pelayanan di bidang sosial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka penyusunan perencanaan strategis di bidang sosial di kabupaten Flores Timur perlu memperhatikan isu-isu strategis nasional di bidang urusan sosial.

Permasalahan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Baik dengan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi	Masih kurangnya tenaga pekerja sosial yang berkompeten	Kurang koordinasi dengan pemerintah pusat	Adanya dukungan dana dari pemerintah pusat
		Belum adanya sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka.	Keterbatasan sarana prasarana dalam mendukung system layanan yang mendukung kebutuhan masyarakat miskin	Adanya aplikasi SIKS-NG
2.	Meningkatnya kualitas dan layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem layanan informasi kesejahteraan sosial yang handal	Rendahnya pelayanan sosial bagi PMKS	Ketersediaan data PMKS yang belum memadai dan belum update	Adanya pemutakhiran data PMKS yang dilakukan secara berkala serta pentingnya validasi dan verifikasi PMKS
		Besarnya beban pengeluaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat	Ketersediaan dana pemberdayaan masyarakat yang masih kurang	Dukungan dana yang bersumber dari APBD 1 dan APBN

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang di wilayah Kabupaten Flores Timur tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian, dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
2. Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu
4. Peningkatan pelayanan sosial bagi PMKS
5. Tingginya beban pengeluaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Tujuan rencana strategis Dinas Sosial Kabupeten Flores Timur Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial tahun 2023-2026 sebagaimana terlihat pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Dinas SosialKabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya Persentase PMKS	Persentase PMKS (%)	11,58	10,42	9,38	8,44	7,60	
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Tingkat kemiskinan (%)	10,19	10,00	9,85	9,60	9,50	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan,dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya Persentase PMKS	Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS	Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan pemberdayaan masyarakat	
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	Menurunnya persentase tingkat kemiskinan	Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	Peningkatan sarana dan prasarana layak
		Peningkatan pendapatan keluarga miskin	Verifikasi dan validasi data kemiskinan
			Fasilitasi bantuan sosial dan pengembangan ekonomi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur akan menjalankan 2 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

dengan dukungan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Penangan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Rencana Program dan Kegiatan yang mendukung indikator dan target kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06				Dinas Sosial				5,255,549,589		4,117,199,589		5,238,472,043		6,905,379,840		21,516,601,061	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				3,184,549,589		2,817,199,589		2,886,472,043		4,558,379,840		13,446,601,061	Dinas Sosial	Larantuka
									Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	2,474,549,589	100	2,422,199,589	100	2,511,472,043	100	2,498,379,840	100	9,906,601,061	Dinas Sosial	Larantuka
									Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100	480,000,000	100	205,000,000	100	245,000,000	100	1,970,000,000	100	2,900,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
									Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		38%	130,000,000	25%	90,000,000	67%	60,000,000	100	30,000,000	100	310,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
									Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	70,000,000	100	60,000,000	100	330,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	70,000,000	100	60,000,000	100	330,000,000	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	2	25,000,000	2	25,000,000	2	15,000,000	2	10,000,000	2	75,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	1	2	15,000,000	2	15,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	50,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3	3	45,000,000	3	45,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	12	150,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	4	10,000,000	12	55,000,000	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	3	3	1,985,249,589	3	1,985,249,589	3	2,074,672,043	3	2,066,579,840	12	8,066,751,061	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan))	26	26	1,920,249,589	26	1,920,249,589	26	2,009,672,043	26	2,011,579,840	26	7,861,751,061	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dok)	0	1		1	45,000,000	1	45,000,000	1	40,000,000	4	130,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dok)	1	1	45,000,000	1	0	1	0	1	0	4	0	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	2	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	15,000,000	8	75,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6	6	30,000,000	6	25,000,000	6	20,000,000	6	15,000,000	24	65,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0	2	10,000,000	2	10,000,000	2	5,000,000	6	25,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	6	6	30,000,000	4	15,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	24	65,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	0	4	130,000,000	4	90,000,000	4	60,000,000	4	30,000,000	16	310,000,000	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dok)	1	1	10,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	15,000,000	1	65,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok)	1	1	10,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	15,000,000	4	65,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	0	7	70,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000			11	110,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0	5	40,000,000	2	30,000,000					7	70,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	100	201,500,000	100	149,500,000	100	149,000,000	100	144,000,000	100	644,000,000	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	2	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	8	8,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	2	5	28,500,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	46,500,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	2	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	40,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	50,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	95,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	4	60,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	4,000,000	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	12	35,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	12	35,000,000	12	145,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1	12	60,000,000	12	65,500,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	245,500,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	0	100	325,000,000	100	25,000,000	100	60,000,000	100	1,800,000,000	100	2,210,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	0	1	35,000,000			1	30,000,000			2	65,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	0	13	125,000,000	2	15,000,000					15	140,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	0	1	10,000,000	1	10,000,000					1	20,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)	0	1	15,000,000							1	15,000,000	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	0	1	75,000,000					1	1,800,000,000	1	1,875,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	0	4	45,000,000			2	30,000,000			5	75,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)		1	20,000,000							1	20,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	100	100	287,800,000	100	287,450,000	100	287,800,000	100	287,800,000	100	575,600,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	12	2,000,000	12	1,650,000	12	2,000,000	12	2,000,000	48	4,000,000	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	12	65,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	48	130,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	12	220,800,000	12	220,800,000	12	220,800,000	12	220,800,000	48	441,600,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	100	125,000,000	100	155,000,000	100	165,000,000	100	155,000,000	100	600,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	11	11	50,000,000	11	80,000,000	11	90,000,000	11	85,000,000	11	305,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)		1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	60,000,000	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	25,000,000	1	115,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	45	48	30,000,000	48	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	120,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				2,071,000,000		1,300,000,000		2,352,000,000		2,347,000,000		8,070,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				475,000,000		150,000,000		507,000,000		432,000,000		1,564,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
									Persentase pemberdayaan KAT (%)	0	36	125,000,000			100	125,000,000	100	125,000,000	100	375,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
									Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	11	13	350,000,000	26	150,000,000	45	382,000,000	24	307,000,000	24	1,189,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		0	36	125,000,000			100	125,000,000	100	125,000,000	100	375,000,000	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	44	75,000,000			44	75,000,000	32	75,000,000	132	225,000,000	Dinas Sosial	Ds. Lewotinah Ole & Ds Lamaole Kec Solor Barat, Ds. Gekeng Deran Kec Tanjung Bunga, Ds. Lamanabi Kec Tanjung Bunga, Ds. Riang Padu Kec Adonara Barat
			1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	44	50,000,000			44	50,000,000	32	50,000,000	132	150,000,000	Dinas Sosial	Ds. Aransina Ds. Lamatutu , Ds. Laton Liwo II
			1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			13	350,000,000	26	150,000,000	45	382,000,000	24	307,000,000	24	1,189,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	50	75,000,000	50	50,000,000	50	125,000,000	50	125,000,000	200	375,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 19 Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (tenaga)	19 TSKS	19 TSKS	75,000,000	19 TSKS	50,000,000	19 TSKS	57,000,000	19 TSKS	57,000,000	19 TSKS	239,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 19 Kecamatan
			1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (keluarga)	0	50	75,000,000	50		50	75,000,000	50	75,000,000	200	225,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 19 Kecamatan
			1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3	2	75,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000			3	200,000,000	Dinas Sosial	Larantuka, Adonara Barat, Ile Mandiri, Solor Barat, Solo (Jawa Tengah)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota		6	50,000,000			6	50,000,000	6	50,000,000	18	150,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	300,000,300	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		300,000,000	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	1	5	75,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000	20	300,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
Terwujudnya Manusia dan masyarakat yang berkualitas	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS (%)	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	46,06	53,06	556,000,000	60,06	375,000,000	67,06	635,000,000	74,06	635,000,000	74,06	2,201,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		70.92	9.87	305,000,000	10.95	170,000,000	12.29	295,000,000	14.01	295,000,000	17.60	1,065,000,000	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	120	25	50,000,000	25	35,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	100	185,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	25	25,000,000	25	0	25	25,000,000	25	25,000,000	100	75,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	50	15	50,000,000	15	35,000,000	15	35,000,000	15	35,000,000	60	155,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	75	25	25,000,000	25	25,000,000	25	25,000,000	25	25,000,000	100	100,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kot a (orang)	0	25	50,000,000	25	35,000,000	25	35,000,000	25	35,000,000	100	155,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kot a (orang)	0	20	25,000,000	20	0	20	25,000,000	20	25,000,000	80	75,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
					04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kot a (orang)	0	5	20,000,000	5	20,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	20	90,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	5	20,000,000	5		5	20,000,000	5	20,000,000	20	60,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	5	20,000,000	5		5	25,000,000	5	25,000,000	20	70,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	5	20,000,000	5	20,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	20	100,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		0	21.33	251,000,000	27.11	205,000,000	37.1901	340,000,000	59.21	340,000,000	85.31	1,136,000,000	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	10	25,000,000	10	30,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	40	105,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	40	200,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	10	30,000,000	10		10	30,000,000	10	30,000,000	40	90,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	40	200,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	10	21,000,000	10		10	50,000,000	10	50,000,000	40	121,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	10	25,000,000	10	25,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	40	150,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	10	25,000,000	10	25,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	40	150,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	5	25,000,000	5	25,000,000	5	35,000,000	5	35,000,000	20	120,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
Terwujudnya Manusia dan masyarakat yang berkualitas	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase Tingkat kemiskinan (%)	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	11,19	13,26	580,000,000	16,33	450,000,000	19,4	750,000,000	22,47	820,000,000	22,47	2,600,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
									Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	97,1	100		100		100		100		100			
			1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		11,19	13,26	180,000,000	16,33	200,000,000	19,4	300,000,000	22,47	320,000,000	22,47	1,000,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	378	5	60,000,000	4	65,000,000	5	100,000,000	6	125,000,000	20	350,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	4	5	60,000,000	4	70,000,000	5	100,000,000	6	120,000,000	20	350,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	0	5	60,000,000	4	65,000,000	5	100,000,000	6	75,000,000	20	300,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		97,1	100	400,000,000	100	250,000,000	100	450,000,000	100	500,000,000	100	1,600,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (orang)	163.685	129.904	100,000,000	129.904	75,000,000	129.904	150,000,000	129.904	150,000,000	293.590	475,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	12.823	12.823	100,000,000	12.823	75,000,000	12.823	100,000,000	12.823	150,000,000	12.823	425,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	163.685	32.476	200,000,000	129.904	100,000,000	129.904	200,000,000	129.904	200,000,000	293.590	700,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	100	310,000,000	100	200,000,000	100	310,000,000	100	310,000,000	100	1,130,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
									Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%)	4	1,2	50,000,000	1,2	50,000,000	1,2	50,000,000	1,2	50,000,000	4,8	200,000,000		
			1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota		100	100	270,000,000	100	160,000,000	100	270,000,000	100	270,000,000	100	970,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota (orang)	549	50	75,000,000	50	50,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	200	275,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	50	50,000,000	50	30,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	200	180,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (unit)	0	3	50,000,000	3	30,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	180,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	25	50,000,000	25	25,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	100	175,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan
			1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	0	25	45,000,000	25	25,000,000	25	45,000,000	25	45,000,000	100	160,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota		100	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	100	360,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (kampung)	10	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	1	50,000,000	10	200,000,000	Dinas Sosial	Ds Duablolong, Ds Pledo, Ds. Oyangbarang, Ds Kolaka, Ds Lamatutu, Ds. Ilepampung, Ds. Adabang, Ds. Sinarhading, Ds. Lewobele, Ds. Nurabelen
			1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (orang)	41	41	40,000,000	41	40,000,000	41	40,000,000	41	40,000,000	41	160,000,000	Dinas Sosial	Tersebar di 19 Kecamatan
			1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola	100	100	25,000,000		0	100	25,000,000	100	25,000,000	100	75,000,000	Dinas Sosial	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota		100	100	25,000,000		0	100	25,000,000	100	25,000,000	100	75,000,000	Dinas Sosial	Larantuka
			1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (makam)	1 Makam	1 Makam	25,000,000			1 Makam	25,000,000	1 Makam	25,000,000	1 Makam	75,000,000	Dinas Sosial	TMP. Lapak Tana -Larantuka

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2023-2026.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target dan Capaian Renstra Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase PMKS (%)	11,58	10,42	9,38	8,44	7,60	7,60
2.	Persentase Tingkat kemiskinan (%)	10,19	10,00	9,85	9,60	9,50	9,50

Kinerja Dinas Sosial selain untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah juga untuk pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib pelayanan urusan bidang sosial sebagai berikut :

Tabel 7.2

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial

No.	Indikator Kinerja sesuai Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)							
1.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	27	100	100	100	100	100
2.	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	82	100	100	100	100	100
3.	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	87	100	100	100	100	100
4.	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	0	100	100	100	100	100
5.	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Indikator Kinerja Kunci							
1.	Presentase (%) penyandang disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	70,92	100	100	100	100	100
2.	Presentase korban bencana alam dan sosial yang terenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Sosial							
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	11,58	10,42	9,38	8,44	7,60	7,60
2.	Persentase PMKS yang tertangani	10,84	10,71	10,58	10,44	10,31	10,31
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan Sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	27	100	100	100	100	100

Sumber : Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dan Nomor 18 Tahun 2020

BAB VIII
P E N U T U P

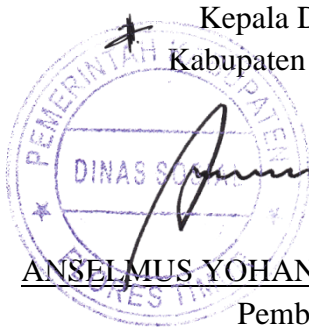
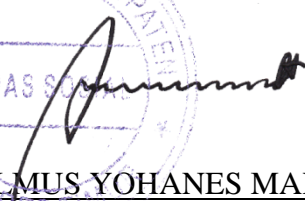
Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat antara lain tujuan dan sasaran SKPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Sosial sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Sosial setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Dinas Sosial).

Akhir kata semoga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Dinas Sosial.

Larantuka, Maret 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur, 

ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19670420 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS SOSIAL

Jln. TMP. LAPAK TANA No.6 Telp/Fax. (0383) 21033

LARANTUKA

DINAS SOSIAL
KABUPATEN FLORES TIMUR
2022